

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022



**ECTY WINDAWIRANA MENTODO
1910421028**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Manajemen

**ECTY WINDAWIRANA MENTODO
1910421028**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

Disusun dan diajukan oleh

ECTY WINDAWIRANA MENTODO'
1910421028

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal 9 September 2023 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 9 September 2023
Disetujui Oleh,

Pembimbing,


Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Yustinizar, S.Sos., M.I.Kom.
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

SKRIPSI

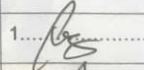
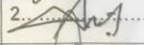
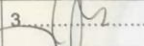
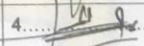
ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

disusun dan diajukan oleh


ECTY WINDAWIRANA MENTODO'
1910421028

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 9 September 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Ketua	1..... 
2.	Dr. H. Syamsuddin Bidol, M.M.	Anggota	2..... 
3.	Muliana, S.E., M.M.	Anggota	3..... 
4.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Anggota	4..... 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : ECTY WINDAWIRANA MENTODO'
NIM : 1910421028
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 9 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,


Ecty Windawirana Mentodo'

PRAKATA

Segala Puji Bagi Tuhan Yesus Kristus atas Kasih dan Perkenanannya, sehingga oleh karena kekuatan dan kemurahanNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022**”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) jurusan Manajemen Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Fajar Makassar guna memperoleh gelar sarjana Manajemen (S.M).

Peneliti mengucapkan terimakasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. . Pertama-tama, peneliti menyadari bahwa Skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang membantu dan dukungan mental maupun materi. melalui ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tua dan saudara yaitu Bapak Ishak dan ibu yang bernama Lince.b serta saudara dan saudari peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si, Selaku Rektor Universitas Fajar Makassar
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si. Selaku Penasehat Akademik

5. Bapak Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M. Selaku Pembimbing Skripsi yang sudah banyak memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nasyirah Nurdin, S.M., M.M. Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen
7. Teman-teman yang ikut serta support serta memberi dukungan dalam penyelesaian Skripsi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran berbagai pihak diharapkan demi menyempurnakan tulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, khususnya di program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Makassar, 9 September 2023

Peneliti

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2020-2022

**Ecty Windawirana Mentodo'
Rachmat Sugeng**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kuatnya pengakuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamasa, strategi berwawasan luas yang digunakan adalah strategi kuantitatif jelas dengan menggunakan metode pengumpulan informasi, yaitu prosedur naratif, kajian dan persepsi. Hasil pemeriksaan diarahkan pada Organisasi Administrasi Keuangan Wilayah Lokal. Mamasa berdasarkan Pemeriksaan Laporan Pengakuan Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Provinsi (APBD), menunjukkan bahwa pelaksanaan pendapatan belum mencapai tujuan namun tergolong kelas pemenang. Hal ini terlihat dari jumlah yang diakui lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan. Sementara itu, kinerja belanja Pemda Kabupaten Mamasa dinilai sangat baik dalam melakukan penghematan. Tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang dimaksudkan menunjukkan hal tersebut.

Kata Kunci: laporan, realisasi, anggaran, efektif, efisien, pendapatan dan belanja daerah, kabupaten Mamasa.

ABSTRACT

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE BUDGET MANAGEMENT OF MAMASA DISTRICT 2020-2022

**Ecty Windawirana Mentodo'
Rachmat Sugeng**

This study plans to decide the degree to which the powerful degree of acknowledgment of the territorial income and consumption spending plan in the local legislature of Kab. Mamasa, the insightful strategy utilized is the quantitative clear strategy utilizing information assortment methods, specifically narrative procedures, studies and perceptions. The aftereffects of examination directed at the Territorial Monetary Administration Organization Kab. Mamasa in regards to the Examination of the Acknowledgment Report of the Territorial Income and Consumption Spending plan (APBD), shows that income execution has not yet arrived at the objective yet is remembered for the successful class, this should be visible from the more modest sum acknowledged contrasted with what was planned. In the mean time, the spending execution of the Mamasa Regime local government is viewed as ready to save the spending financial plan proficiently. The absence of realization figures that exceed the intended spending budget demonstrates this.

Keywords: report, realization, budget, effective, efficient, income and spending Area, Mamasa district.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	10
2.1.1 Pengertian Anggaran	11
2.1.2 Pengertian Pendapatan	15
2.2 Tinjauan Empirik.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Rancangan Penelitian	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Populasi dan Sampel	32
3.4 Pengukuran Variabel Penelitian	33
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	34
3.6 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	37
4.2 Hasil Penelitian	43
4.3 Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2020-2022	7
2.1	Tinjauan Empirik Penelitian Terdahulu	25
3.1	Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	33
3.2	Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	34
4.1	Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A 2020-2022	44
4.2	Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Transfer T.A 2020-2022	45
4.3	Ringkasan Laporan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah T.A 2020- 2022	46
4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Operasi T.A 2020-2022	47
4.5	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Modal T.A 2020-2022	48
4.6	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga T.A 2020-2022	49
4.7	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Transfer T.A 2020-2022	50
4.8	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020	51
4.9	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2021	52
4.10	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2022	53
4.11	Kriteria Tingkat Efektif Penerimaan PAD	54
4.12	Kriteria Tingkat Efisien Belanja Secara Umum	54
4.13	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa 2020	55
4.14	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa 2021	57
4.15	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa 2022	60
4.16	Rasio Efektif Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Keb Mamasa Tahun 2020-2022	62
4.17	Rasio Efisien Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab Mamasa Tahun 2020-2022.	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	31
4.1	Struktur Organisasi.....	41
4.2	Grafik Anggaran pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022	63
4.3	Gambar 4.3 Grafik Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1.	Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa Tahun 2020.....	75
2.	Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa Tahun 2021-2022.	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Administrasi Moneter Teritorial berdampak pada kemajuan suatu daerah. Pengelolaan moneter teritorial yang dilakukan secara moneter, produktif dan jujur serta jujur, penuh tanggung jawab dan kewajaran akan memberdayakan pembangunan keuangan yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk mengawasi dana daerah diperlukan SDM, namun juga sumber daya keuangan sebagai dana yang dituangkan dalam rencana belanja. Pada periode perubahan ini, Otoritas Publik diharapkan dapat mendistribusikan setiap Laporan Moneter Provinsi kepada masyarakat umum. Kita bisa mengamati kinerja mereka melalui laporan keuangan tersebut. Mengingat Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 pasal 325 tentang Pemerintahan Kewilayahan, khususnya Aturan Keyakinan yang Sah, Pedoman Organisasi Yang Sengaja, Standar Transparansi, Aturan Proporsionalitas, Aturan Keterampilan Mengesankan, Standar Tanggung Jawab, Pedoman Produktivitas dan Kelayakan serta Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Uang Antara Pemerintahan Fokus dan Pemerintahan Daerah, namun yang lebih prinsipil adalah meningkatkan kemampuan dan kelayakan aset moneter para penyelenggara untuk menjalankan kemampuan Pemerintahan. Oleh karena itu, laporan moneter yang signifikan, dapat diandalkan, setara, dan dapat dibenarkan merupakan hal yang sangat mendasar bagi siklus dinamis. Selain itu, laporan keuangan yang akurat memudahkan penilaian sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan daerah mencerminkan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Penyelenggaraan kemerdekaan wilayah dimaksudkan untuk memberikan kemampuan adaptasi kepada daerah dalam kemajuan provinsi melalui upaya yang cukup siap untuk memperluas dukungan dinamis daerah, karena pada dasarnya ada tiga misi utama dalam penyelenggaraan kemerdekaan wilayah (Mardiasmo, 2008: 25), khususnya meningkatkan produktifitas dan kecukupan aset provinsi, mengupayakan sifat administrasi publik dan bantuan perseorangan pemerintah, melibatkan dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengambil bagian dalam siklus kemajuan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kewenangannya. Pengawasan Badan Kewenangan Negara Provinsi terhadap Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Wilayah mungkin sudah dilakukan sejak tahap penyusunan, bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan pengumuman seperti yang terjadi selama ini sehingga sesuai dengan Pedoman Resmi Peraturan Mamas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan kepada Pedoman Resmi Mamas Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Pendapatan dan Penggunaan Daerah Rezim Mamas Tahun Anggaran 2021 dan Pedoman Usaha Pendeta Dalam Rumah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Kelola Keuangan Daerah. Hal ini penting karena dalam periode keuangan Badan Tata Usaha Negara Provinsi mempunyai kekuasaan untuk menentukan arah dan strategi umum rencana belanja pendapatan dan penggunaan daerah. Memperhatikan penjelasan tersebut, jelaslah tugas Wakil Jabatan Provinsi dalam mengawasi keuangan daerah sangatlah besar dan mempunyai 3 sifat yang sangat penting sebagai upaya untuk memahami tanggung jawab publik pemerintah yang sedang berlangsung secara lugas, bertanggung jawab,

produkti, menarik dan bijaksana. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah (Nordiawan, dkk, 2007: 39). Instrumen penting Pemda adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja Rencana Belanja Gaji dan Pemanfaatan Wilayah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana moneter tahunan daerah yang Mamasa Pemerintahan mempunyai kekayaan alam yang sangat besar yang diharapkan dalam mengerjakan bantuan pemerintah daerahnya. Dari berbagai industri, banyak hal berbeda yang bisa dijadikan sumber pendapatan. Perekonomian Rezim Mamasa didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, jasa penjaga hutan, perburuan dan penangkapan ikan, yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Aturan Mamasa yang sebenarnya juga merupakan wilayah yang wilayahnya sangat terpencil yaitu berada di wilayah berbatu (pedalaman). Hal ini mengakibatkan rendahnya dan terbatasnya izin masuk bagi kelompok-kelompok yang tidak beruntung untuk meningkatkan dan memperluas cara hidup mereka. Apalagi mengenai modal finansial yang sangat terbatas, baik tanah hortikultura maupun uang. Estimasi pelaksanaan moneter untuk kepentingan umum dapat dijadikan sebagai penilaian dan menetapkan kembali pelaksanaannya dengan mengkaji rencana kerja dan pelaksanaannya berdasarkan pedoman daerah (Nordiawan, dkk, 2007: 39). Rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Wilayah (APBD) adalah instrumen strategi mendasar bagi negara-negara tetangga. APBD dapat dimanfaatkan sebagai

instrumen untuk memutuskan berapa gaji dan penggunaan, bantuan arah dan pencapaian perbaikan, kekuatan konsumsi masa depan, hotspot untuk menciptakan langkah-langkah standar untuk penilaian pelaksanaan, perangkat untuk menginspirasi perwakilan dan perangkat koordinasi untuk pergerakan masyarakat. segala macam dari unit kerja yang berbeda. Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Mamasa yang akan dicapai sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Analisis atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa akan menghasilkan informasi penting terutama dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah Kantor Bupati Kabupaten Mamasa telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah. Bentuk penilaiannya berupa analisis rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD (Halim, 2012). Pengukuran kinerja keuangan dirasa sangat penting karena untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Mengingat bahwa akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya sekedar kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara efektif, efisien dan ekonomis (Mardiasmo, 2009). Salah satu cara menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan cara analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio yang digunakan seperti rasio efisiensi dan efektivitas.

Proporsi kemampuan keuangan provinsi menggambarkan perbandingan antara pengakuan pemanfaatan wilayah dan pengakuan upah daerah. Eksekusi moneter pemerintah teritorial dianggap produktif apabila proporsi yang dicapai di bawah 1 (satu) atau di bawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil proporsi efektivitas moneter daerah berarti semakin baik penyajian moneter pemerintah provinsi dan semakin produktif pula administrasi moneter daerah. Proporsi kelayakan moneter provinsi menunjukkan kapasitas pemerintah provinsi dalam menyiapkan pendapatan bantalan sebagai jaminan. Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD, yang merupakan komponen penting Daerah Otonom, harus dievaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas. Dikatakan layak jika mencapai 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Bagaimanapun, proporsi kelayakan yang lebih tinggi mencerminkan kinerja keuangan pemerintah yang jauh lebih baik. Selain kelangsungan proporsinya, hal utama dalam menjalankan dan mengakui kemandirian wilayah adalah mengurangi biaya pemanfaatan lokal. Hal ini diperlukan karena meskipun pemerintah daerah telah berhasil mencapai target pendapatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, namun pencapaian tersebut tidak akan banyak berguna jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target pendapatan tersebut. pendapatan sebenarnya yang diterimanya. Oleh karena itu, tindakan ini harus diambil.

Ketika mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah, pengukuran kinerja keuangan merupakan hal yang paling penting. Dalam pengelolaan keuangan suatu daerah, akuntabilitas berarti lebih dari sekedar mampu menunjukkan bagaimana dana publik digunakan; hal ini juga mencakup kemampuan untuk menunjukkan bahwa dana publik telah digunakan secara efektif, ekonomis, dan efisien. Istilah “ekonomis” mengacu pada pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga terendah. Yang dimaksud dengan “efektif” adalah penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran atau tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan “efektif” adalah penggunaan dana masyarakat untuk menghasilkan output yang maksimal. Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan merupakan salah satu metode untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa dalam pengelolaan keuangannya. Kajian pelaksanaan moneter yang berbeda telah dilakukan seperti Pilat, J.J dan Morasa .J (2017) yang menduga bahwa pelaksanaan Moneter Lokal Kota Manado tahun anggaran 2011-2015 tingkat Kelayakan dan Kemahiran dalam penyelenggaraan moneter teritorial Kota Manado cukup baik, menarik dan sangat mahir. Hal ini terlihat dari tingginya nilai rata-rata Proporsi Kecukupan yang setara dengan 99,864% dan rendahnya nilai normal Proporsi Produktivitas yang setara dengan 0,835% pada periode rencana belanja jangka panjang. Namun contoh keterhubungan antara derajat otonomi Pemerintahan Daerah Manado adalah pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan subsidi untuk menyelesaikan tugas-tugas legislatif, pembangunan dan administrasi sosial daerah dalam rangka kenyataan bahwa tugas Pemerintahan Fokus masih dominan dalam menangani dana Pemerintah Daerah Kota Manado. Demikian pula penelitian Saputra (2018) yang

menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jember dalam mengawasi pembayaran daerah sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi Jember sudah baik, mengalami perkembangan yang positif karena pemerintah daerah setempat mampu mengimbangi dan bahkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya namun derajat otonomi keuangan daerah semakin meningkat, kerjasama daerah dalam pembangunan provinsi semakin meningkat. Ditunjukkan dari indikator pelaksanaan keuangan seperti tingginya ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat, keberlangsungan APBD para pengelola sangat menarik, namun kemampuan mengawasinya kurang baik.

Eksplorasi ini merupakan replika dari riset masa lalu yang melakukan tindakan eksekusi moneter. Subyek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yang membedakannya dengan penelitian lainnya.

Tabel 1.1 Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa
2020-2022

TAHUN			
Pendapatan	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	43.985.258.914,03	35.858.877.712	31.360.188.274
Dana Perimbangan	801.192.653.000,00		701.495.322.300
Pendapatan Transfer		859.143.560.342	857.016.972.642
Lain-lain Pendapatan yang sah	213.454.701.908,00	31.177.500.000	15.000.000.000
Belanja			
Belanja operasi	616.617.795.506,32	622.264.744.854	759.430.436.570
Belanja Modal	417.372.985.667,36	126.846.395.230	154.820.436.570
Belanja tidak terduga		10.000.000.000	11.000.000.000
Belanja Transfer		198.119.495.000	189.638.599.000
Pembiayaan Daerah			
Penerimaan	Pembiayaan		
Daerah	30.368.167.351,65	76.906.292.980	213.012.213.839
Pengeluaran Pembiayaan	1.010.000.000,00	45.855.595.950	1.500.000.000

Sumber: <https://www.mamasa.go.id>

Wijayanti (2015) menyatakan bahwa pemanfaatan penjatahan umum diserahkan kepada negara teritorial sesuai kebutuhan, kepentingan dan kebutuhan setiap daerah yang bertekad untuk menggarap pemerintahan terbuka guna melaksanakan kemandirian daerah. Meskipun pemerintahan daerah sudah mendapat transfer dana dari pemerintah pusat melalui penyesuaian cadangan, namun hal ini belum mampu mengalihkan administrasinya ke daerah.

Dengan melihat Data Anggaran pada tahun 2020-2022 ini menarik bagi peneliti sehingga mengangkat judul penelitian “ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahannya adalah “Sudahkah Kabupaten Mamasa memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara Sungguh-sungguh dan Produktif?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud yang ingin dicapai dalam peninjauan ini adalah untuk mengkaji kelayakan dan efektivitas pengelolaan Rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Daerah (APBD) Rezim Mamasa Tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi ilmu pengetahuan dipercaya dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu moneter, khususnya dalam hal pendugaan pelaksanaan administrasi rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Daerah Peraturan Mamasa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi bagi organisasi pemerintah daerah provinsi dalam memperkirakan keterlaksanaan penanganan Rencana Belanja Pendapatan dan Pemanfaatan Wilayah, maka dalam hal ini bagian uang Peraturan Mamasa diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan pendekatan administrasi dan pengembangan lebih lanjut pelaksanaannya. menangani rencana Pendapatan dan Penggunaan Keuangan, khususnya untuk Badan Legislatif Daerah Rezim Mamasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Administrasi Moneter Teritorial mengandung makna setiap hak dan komitmen daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan provinsi yang dapat dihargai dalam bentuk uang dan segala jenis kelimpahan yang berkaitan dengan keistimewaan dan komitmen daerah. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, setiap daerah diharapkan dapat menerapkan kaidah nilai penting uang dalam melaksanakan pemerintahan provinsi, baik secara finansial, efisien dan aktual. Selain itu, setiap daerah menerapkan standar pelayanan, keterusterangan, tanggung jawab dan keadilan yang tertuang dalam pedoman Pendeta Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Administrasi Keuangan Daerah. Penyelenggaraan moneter daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan dituangkan dalam Rencana Belanja Pendapatan dan Konsumsi Provinsi (APBD) yang ditetapkan setiap tahun dengan pedoman daerah. Rencana Belanja Pendapatan dan Penggunaan Daerah (APBD) sesuai Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keserasian Moneter antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi merupakan rencana moneter tahunan Pemerintahan Daerah yang disahkan dan dibicarakan bersama oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah. Badan Perwakilan Wilayah Negara (DPRD) untuk kemudian ditetapkan dengan Pedoman Daerah.

Undang-undang Nomor Menurut Pasal 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah, anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan merupakan komponen utama APBD. Menurut Zulaikah (2019), tahun anggaran APBD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun tersebut. Kerangka waktu ini digunakan sedapat mungkin untuk mengelola, mengendalikan, dan mengawasi keuangan daerah. Bagian utama dari struktur APBD adalah gaji daerah. Sebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Uang Daerah, disebutkan bahwa gaji provinsi merupakan hak negara teritorial yang dapat dianggap menambah nilai sumber daya bersih. Rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang mempunyai potensi menambah pemerataan dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dilunasi, bertanggung jawab atas seluruh pendapatan daerah.

2.1.2 Pengertian Anggaran

Rencana pengeluaran adalah perangkat untuk mengatur dan mengatur tugas manfaat dalam kegiatan manfaat dimana tingkat kesesuaian rencana pengeluaran bergantung pada ukuran asosiasi. Untuk melaksanakan upaya-upaya di atas, tentu saja diperlukan suatu pengaturan yang matang. Oleh karena itu, dari gambaran tersebut cenderung dirasakan pentingnya persiapan dan pengawasan yang baik yang harus diperoleh dewan dengan cara mencermati, membedah dan secara hati-hati mempertimbangkan kemungkinan hasil, pilihan dan hasil yang ada sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. A. Menurut Munandar, (2009:11), pengertian rencana belanja adalah, "Rencana belanja adalah suatu pengaturan yang disusun dengan sengaja yang meliputi seluruh kegiatan organisasi. Yang dikomunikasikan dalam satuan keuangan dan bersifat substansial untuk jangka waktu tertentu di kemudian hari".

- b. Menurut Nafarin (2007) pengertian rencana keuangan adalah, “Rencana keuangan adalah suatu pengaturan moneter yang bersifat intermiten yang telah diatur oleh program-program yang telah disahkan”.

Perencanaan merupakan interaksi tindakan yang menghasilkan rencana keuangan sebagai akibat, serta proses pergerakan yang dihubungkan dengan kemampuan-kemampuan rencana belanja yang meliputi kemampuan memberikan aturan kerja, kemampuan mengorganisasikan kerja, dan kemampuan menilai (mengarahkan) pekerjaan. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan, data masa lalu, potensi perkembangan ekonomi, strategi, kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah, dan penelitian untuk pengembangan perusahaan, semuanya dapat diperhitungkan saat menyusun anggaran.

Fungsi anggaran adalah sebagai salah satu alat manajemen yaitu:

1. Kemampuan penyusunan, rencana belanja sebagai instrumen penyusunan hendaknya juga menitikberatkan pada keterkaitan antara satu rencana keuangan dengan rencana keuangan lainnya. Perencanaan agar dana tersedia seefisien mungkin merupakan aspek penting lainnya dalam perencanaan anggaran. Rencana keuangan adalah instrumen perencanaan yang disusun yang memandu pemikiran yang cermat dan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang unit dan uang tunai.

2. Kemampuan pelaksanaan, rencana anggaran sebagai aturan pelaksanaan pekerjaan bermaksud agar sebelum pekerjaan selesai harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para ahli (khususnya dalam masalah moneter). Pekerjaan dianjurkan selesai apabila ada rencana keuangan atau tidak melenceng dari rencana pengeluaran. secara selaras untuk mencapai tujuan (keuntungan). Oleh karena itu, anggaran sangat penting untuk menyelaraskan aktivitas masing-masing divisi, baik itu divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan, dan divisi umum.
3. Kemampuan pengawasan, rencana pengeluaran merupakan suatu cara pengelolaan atau pengendalian (controlling) manajemen mengandung arti menilai (mengevaluasi) pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membedakan antara pengakuan dan rencana (rencana pengeluaran) serta melakukan tindakan perbaikan apabila hal tersebut terjadi. dianggap signifikan.

Penting (atau sebaliknya jika ada kapasitas antagonis). Alasan pengawasan ini bukan untuk menemukan kesalahan, namun untuk mencegah dan mengatasi kesalahan. (28 (Nafrin, 2007).

Menurut Reimassa (2021) rencana pengeluaran dapat diartikan sebagai sekumpulan penjelasan mengenai evaluasi dan konsumsi yang seharusnya terjadi mulai saat ini. Anggaran adalah pernyataan tentang ekspektasi kinerja yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran keuangan.

Menurut Anthony (2016) Rencana pengeluaran merupakan bagian penting dalam perencanaan, yang berisi rencana pelaksanaan di masa depan dan menunjukkan pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang berwenang. Anggaran perusahaan merupakan alat pengendalian dan perencanaan yang penting. Perencanaan berbasis eksekusi merupakan strategi perencanaan yang menitikberatkan pada variabel-variabel yang menyertainya; Hubungan antara latihan dan hasil yang diatur dan hasil normal, mengingat penggunaan rencana keuangan untuk mencapai tujuan dan kemajuan tersebut.

1) Penyusunan Anggaran

Cara paling umum untuk menyiapkan pedoman yang mencakup upah dan konsumsi teritorial harus mengacu pada pedoman dan peraturan yang bersifat material, misalnya peraturan, undang-undang tidak resmi, pernyataan pastoral, pedoman lokal atau pilihan eksekutif provinsi. Dalam pembahasan APBD, diketahui masih ada tiga pola hubungan eksekutif dan legislatif: akomodasi, dominasi, dan kompromi. Pola-pola ini ditemukan pada saat proses penyusunan peraturan pemerintah daerah. Pada tingkat Badan Anggaran dan tingkat komisi yang membawahi beberapa SKPD, pola hubungan eksekutif dan legislatif cenderung didominasi oleh sisi legislatif.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komponen penting APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakannya. Para eksekutif dapat menerapkan anggaran dengan sukses; dalam hal ini pengguna anggaran adalah seorang eksekutif atau pengguna anggaran adalah seorang eksekutif atau

pengguna anggaran yang mampu mengelola anggaran dan selalu dapat diandalkan untuk mengelola anggaran yang lebih besar, meskipun berpindah dari OPD.

3) Pelaporan anggaran

Diperlukan kerangka pengungkapan yang baik untuk mampu menyaring dan mengendalikan pelaksanaan administratif dalam melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan.

Anggaran Daerah Meliputi:

- 1) Pendapatan Daerah
- 2) Belanja Daerah
- 3) Pembiayaan Daerah

2.1.3 Pengertian Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintahan Daerah yang dipersepsikan sebagai perluasan nilai total kekayaan (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat). Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, seluruh penerimaan kas melalui Rekening Kas Umum Daerah berkontribusi pada penyertaan dana lancar, yang merupakan hak daerah yang diberikan untuk satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pembayaran kembali oleh daerah. Dalam referensi Kata Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah akibat dari pekerjaan (bisnis atau sebagainya).

Tingkat gaji adalah salah satu standarnya kemajuan atau tidaknya suatu daerah. Dengan asumsi gaji di suatu daerah pada umumnya rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kemajuan juga akan rendah. Demikian pula, jika gaji masyarakat di suatu daerah cukup tinggi, maka tingkat dukungan pemerintah dan kemajuan daerah tersebut juga tinggi. Konsumsi masyarakat atau distribusi pendapatan disebut distribusi. Ketiadaan penyaluran gaji dapat menyebabkan rendahnya daya beli, tingkat kemiskinan, perilaku buruk, kelaparan, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan menimbulkan kebencian antara pihak yang bergaji rendah terhadap pihak yang bergaji besar, sehingga menimbulkan rasa iri hati di kancah publik. Menurut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, segala pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pencatatan transfer dianggap sebagai pendapatan lain daerah yang sah. Termasuk di dalamnya hibah, dana darurat, dan penghasilan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Gaji teritorial sesuai Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Administrasi Moneter Daerah adalah seluruh kebebasan provinsi yang dianggap menambah nilai sumber daya bersih dalam rentang waktu tahun anggaran yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena sumber pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerah. Gaji teritorial juga berperan dalam pelaksanaan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendorong perkembangan dan menggerakkan perekonomian suatu daerah.

Komponen gaji daerah antara lain Gaji Provinsi Unik (Bantalan), Gaji Pindahan, dan Gaji Teritorial Asli Lainnya. Sesuai Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gaji Provinsi Khusus adalah gaji yang diterima oleh kabupaten yang dikumpulkan berdasarkan pedoman wilayah sesuai pedoman hukum. Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul "Administrasi Moneter Provinsi" mengungkapkan bahwa Bantal adalah seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari sumber keuangan daerah yang unik. Cushion merupakan bagian untuk menghitung kebebasan finansial suatu daerah dalam melaksanakan kemandirian provinsi. Semakin tinggi pendapatan Cushion suatu daerah, maka semakin besar pula derajat kebebasannya sehingga ketergantungan pada kebijakan pemerintah pusat dan badan legislatif daerah lainnya semakin berkurang. Perluasan wilayah Cushion menunjukkan kemajuan provinsi yang lebih tinggi dalam mengawasi sumber pendapatan daerah. Sumber Mata Air Gaji Unik Provinsi berasal dari :

1. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang karena tidak menerima imbalan secara langsung dan bersifat memaksa. digunakan untuk kebutuhan daerah guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah provinsi mempunyai pilihan untuk memungut biaya lingkungan sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga jika warga tidak membayarnya, hal itu akan dianggap sebagai kewajiban. Demi ketepatan warga dalam melunasi pengeluaran provinsi, persetujuan otoritatif berupa denda bea atas utang biaya yang dibayarkan setelah batas waktu angsuran

terpaksa diberlakukan.

2. Retribusi Daerah

Pembayaran atas jasa atau penerbitan izin khusus yang khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau organisasi merupakan contoh pungutan daerah. Pemungutan retribusi daerah, berbeda dengan pajak daerah, mempunyai prestasi tandingan yang ditunjuk langsung. Balas dendam wajib dengan memanfaatkan atau mengambil bagian dalam pemerintahan mengkomodasi jumlah korban.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dampak dari keterisolasian pengelolaan provinsi adalah pendapatan daerah akibat nilai kerjasama terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai perampasan manfaat/keuntungan.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lainnya: Tunjangan Hukum adalah gaji yang diperoleh daerah kecuali penilaian, tuntutan, dan akibat dari pengurusan sumber daya provinsi mandiri, yang terdiri atas:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerja sama Daerah
- d. Jasa Giro
- e. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
- f. Pendapatan Bunga
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah

A. Pendapatan Transfer

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan transfer merupakan pendapatan antar daerah yang bersumber dari APBN atau

APBD yang bertujuan untuk pemerataan pendapatan daerah dan menutup kesenjangan fiskal. Kesenjangan moneter daerah merupakan perbedaan antara kebutuhan keuangan daerah dengan batas keuangan daerah, sehingga untuk menutupi kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka menghasilkan pendapatan tambahan melalui perpindahan ke daerah sangatlah penting. Pendapatan perpindahan berasal dari fokus pemerintah dalam APBN dan berasal dari APBD antar daerah. Macam-macam uang pindahan terdiri dari cadangan penyesuaian, Aset Dorongan Teritorial, Aset Kemerdekaan Khusus, Aset Kehormatan, dan Aset Kota.

1. Dana Perimbangan

Cadangan penyesuaian adalah cadangan yang bermula dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mensubsidi kebutuhan. Berapa cadangan penyesuaian yang diselesaikan setiap tahun dalam APBN dan porsinya yang tidak seluruhnya diselesaikan dengan pedoman resmi dengan memperhatikan seluk-beluk APBN.

Dana perimbangan terdiri dari:

- a. Dana Transfer Umum (DTU)
- b. Dana Transfer Khusus (DTK)

2. Dana Insentif Daerah

Aset Impetus Provinsi (DID) adalah cadangan yang dimulai dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan tindakan tertentu yang ditentukan untuk memberi imbalan atas peningkatan tertentu serta prestasi pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Dana Desa

Aset Kota adalah cadangan yang dimulai dari APBN yang

direncanakan untuk kota melalui APBD Rezim/Kota. Aset Kota digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kota, pelaksanaan pembangunan, peningkatan wilayah, dan penguatan wilayah setempat.

B. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Gaji asli daerah lainnya adalah gaji lain yang diperoleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikecualikan dalam tata cara Pembayaran Bantal dan Pindahan. Pembayaran Lokal Asli lainnya mencakup:

1. Hibah

Pembayaran penghargaan adalah bantuan dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja dan produk mulai dari pemerintah pusat, badan legislatif terdekat lainnya, jaringan dan substansi bisnis lokal atau asing yang tidak membatasi. Pemberian penghargaan diberikan untuk membantu peningkatan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan susunan peraturan dan pedoman.

2. Dana Darurat

Cadangan krisis adalah cadangan yang dimulai dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pascabencana untuk mensubsidi kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh kegagalan yang tidak dapat diatasi oleh daerah yang melibatkan aset APBD sesuai pengaturan hukum.

Pembayaran lainnya sesuai pengaturan hukum

Gaji lain yang diterima oleh daerah tersebut sesuai dengan pengaturan hukum.

Belanja rutin pemerintah adalah anggaran yang disediakan untuk melaksanakan tugas-tugas umum dan melaksanakan pembangunan,

belanja rutin ini diperlukan:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Subsidi daerah otonomi
4. Bunga dan cicilan hutang
5. Pengeluaran rutin lainnya

Dalam mensurvei kinerja keuangannya, badan legislatif daerah dapat menggunakan pemeriksaan proporsi keuangan atas laporan keuangan. Pemeriksaan laporan moneter menurut Mahsun (2012) merupakan suatu alat yang digunakan untuk memahami permasalahan dan pintu terbuka yang terdapat dalam laporan moneter. Sementara itu, pemeriksaan pelaksanaan moneter menurut Halim (2012) merupakan upaya untuk membedakan kualitas moneter berdasarkan laporan moneter yang dapat diakses. Pemanfaatan pemeriksaan proporsi moneter di ranah publik, khususnya dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum banyak dilakukan sehingga belum ada pengaturan yang konsisten mengenai prinsip-prinsip perkiraan pelaksanaannya (Halim, 2012).

1. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

Mengingat Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Moneter Provinsi dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan penyelenggaraan moneter daerah, hendaknya memperhatikan administrasi moneter secara metodis, sesuai dengan pedoman hukum, secara benar dan benar. cakap, finansial, lugas, dan cakap dengan berfokus pada standar keadilan, legitimasi, dan keuntungan bagi masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Pedoman Masalah Rumah Tangga No. 13 Tahun 2006 Kecukupan adalah tercapainya hasil program dengan fokus yang telah ditetapkan dengan memperbandingkan hasil dan hasil. Jadi Proporsi

Kecukupan Cushion adalah proporsi yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil Cushion dengan target yang telah ditetapkan. Selain daripada Proporsi Kecukupan Bantalan menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengaktifkan pendapatan Bantalan sesuai target (Mahmudi, 2016). Menurut Halim (2012), Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Semakin tinggi proporsi kelangsungan hidup, maka semakin baik dan kuat kapasitas kabupaten tersebut. Efektivitas adalah mencapai hasil terbesar dengan informasi tertentu atau dengan demikian pemanfaatan kontribusi yang paling kecil untuk mencapai hasil tertentu. Oleh karena itu, penting juga untuk menghitung proporsi efektivitas Cushion, yang menggambarkan korelasi antara berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan gaji dan pengakuan yang diterima.

a. Efektifitas

Pemerintah Daerah tidak bisa mengabaikan pentingnya pelayanan publik karena hampir dapat dipastikan kemacetan akan berdampak pada semua sektor apabila komponen pelayanan mengalami stagnasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan standar pelayanan masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah.

Viabilitas merupakan suatu kondisi yang memuat pemahaman akan terjadinya suatu dampak atau dampak yang diinginkan, sehingga kegiatan ini dianggap menarik dengan asumsi dapat menimbulkan suatu hasil atau mencapai tujuan yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa target dan tujuan yang dicapai dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan pemerintah.

Efektivitas kinerja aparat Pemerintah merupakan suatu faktor yang paling sering menentukan keberhasilan suatu organisasi pemerintahan, dengan tujuan

akhirnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Aparat pemerintah yang baik dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan bekerja secara maksimal, demi terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan yang diminta masyarakat. Efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika tujuan yang ditetapkan sebelumnya berhasil untuk dicapai.

b. Efisiensi

Rasio realisasi belanja daerah terhadap realisasi total pendapatan daerah merupakan ukuran efisiensi keuangan daerah. Sartika (2019) mengatakan bahwa proporsi kecakapan provinsi merupakan pemeriksaan antara berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan gaji dengan pengakuan gaji yang didapat. Menurut Sartika (2019), jika rasionya kurang dari 100 persen maka kinerja pemerintah dianggap efisien. Dengan kata lain, semakin rendah persentasenya, maka akan semakin efisien. Proporsi Produktif juga dapat dikatakan sebagai perbandingan antara biaya yang ditimbulkan dengan pengakuan gaji yang didapat (Budianto, 2020). Kemahiran berhubungan erat dengan gagasan efisiensi. Estimasi kemahiran diselesaikan dengan menggunakan pemeriksaan antara hasil yang dibuat dan informasi yang digunakan. Jalannya latihan fungsional dapat dianggap mahir jika suatu item atau hasil pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan pemanfaatan aset dan aset sesedikit mungkin. Indikator efektivitas menggambarkan hubungan antara kontribusi aset oleh unit yang berwenang atau legislatif (misalnya staf, kompensasi, pengeluaran manajerial) dan hasil selanjutnya.

2.2 Tinjauan Empirik

Kajian empiris merupakan penelitian terdahulu yang memperlihatkan konsep yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama penulis Tahun Dan Judul	Hasil
1	<p>Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari & Jayantini, N. D. (2017). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan.</p>	<p>Berdasarkan hasil eksplorasi, diketahui bahwa gaji mutlak Kota Bebetin adalah Rp. 2.721.115.000 dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan fungsional dan konsumsi di Kota Bebetin bertambah hingga Rp. 2.721.115.000 Maka dari jumlah tersebut terlihat bahwa selisih antara gaji Kota Bebetin dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendanai pelaksanaan fungsi dan Pemanfaatan Kota Bebetin adalah sebesar Rp 51.546.985,09. Dari perbedaan jumlah gaji dan berapa konsumsi untuk kegiatan fungsional dan belanja kota, terlihat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan fungsional dan penggunaan Kota Bebetin lebih besar dibandingkan dengan gaji yang</p>

No	Nama penulis Tahun Dan Judul	Hasil
		diperoleh Kota Bebetin sehingga di penyelenggaraan moneter Kota Bebetin pada tahun 2018 dikatakan mengalami defisit.
2	Aldy H. R. Pankey dkk, 2017. Kajian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011–2015	Dampak dari tinjauan tersebut adalah: 1. Proporsi otonomi menunjukkan derajat kebebasan provinsi yang tidak banyak. 2. Masih rendahnya persentase desentralisasi fiskal. 3. Bantalan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat tinggi, terbukti dari proporsi kecukupannya. 4. Proporsi kesesuaian konsumsi daerah menunjukkan bahwa pengorganisasian belanja individu masih belum merata. 5. Akibat administrasi yang keliru yang mungkin dilakukan oleh otoritas publik, hal ini menghasilkan hasil moneter yang tidak memuaskan.

No	Nama penulis Tahun Dan Judul	Hasil
3	Susanto, 2017. Analisis Efisiensi dan Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin.	Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa pemaparan DPPKAD APBD Peraturan Musi Banyuasin tentang Pendapatan Daerah sangat efektif; Namun pada saat yang sama pemaparan APBD tidak dapat dilaksanakan karena pengakuan yang dicapai tidak sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PAD antara lain rendahnya pajak daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hakikat dan tata usaha penerimaan negara.
4	Mahendri, P. V., Arsana, I., & Nurhayanti, K. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Sukawati Periode 2019-2021	Metode penyelidikan informasi yang digunakan bersifat subjektif dan kuantitatif. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pameran keuangan ditinjau dari pemeriksaan tingkat kelayakan tahun 2019 – 2021 mempunyai rata-rata sebesar 92,41% dengan standar yang baik, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Balai

No	Nama penulis Tahun Dan Judul	Hasil
		Pemerintahan Daerah Sukawati dalam menangani anggaran sangat baik. Besar.
5	Nurhikma, r. analisis anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja (studi kasus dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pinrang) tahun 2020.	studi saudara dan web. Dari hasil penelitian yang diperoleh pencipta, dapat diduga bahwa (1) Pelaksanaan rencana keuangan pada Badan Terpadu Satu Pintu dan Administrasi Pemerintahan Rezim Pinrang berdasarkan Laporan Pengakuan Rencana Belanja (LRA) dapat dikatakan efektif. Namun belum mahir karena apa yang diakui lebih tinggi dari yang direncanakan. (2) Rencana belanja berbasis pameran pada Badan Koordinasi Terpadu dan Administrasi Ventura Rezim Pinrang telah terselesaikan dengan baik, sesuai dengan fokus pelaksanaan yang sudah sangat diperhatikan sehingga rencana keuangan berbasis presentasi dapat diharapkan berhasil
		<i>The exploration results show that (1)</i>

No	Nama penulis Tahun Dan Judul	Hasil
6	Pandere, p. (2023). analisis pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kab. gowa	<i>income the executives at the Gowa region DPRD secretariat can be supposed to be great, this should be visible from the rate level of income acknowledgment to the income spending plan of 100 percent; (2) Use the board at the Gowa region DPRD secretariat can be supposed to be great, this should be visible from the rate level of consumption acknowledgment to the use financial plan of 76%. This is demonstrated by the shortfall of real use that surpasses the consumption spending plan.</i>

Sumber: Hasil sintesa, 2023

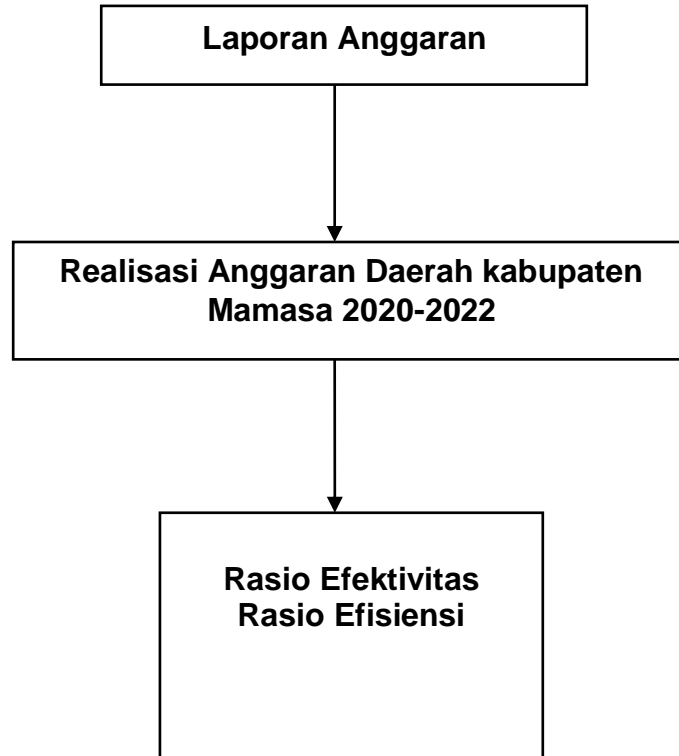
2.3 Kerangka Pemikiran

Evaluasi bertujuan untuk menentukan tingkat produktivitas dan kecukupan yang dapat dicapai. Salah satu organisasi otoritas publik yang melakukan hal tersebut adalah Pemerintahan Rezim Mamasa yang ikut serta dalam pelaksanaan Rencana Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan semaksimal mungkin.

Gaji Unik Provinsi (Bantal). Penyelenggaraan rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Wilayah, khususnya yang dukungan administrasinya dalam Rapat Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan kekayaan Pendapatan Asli Daerah (Bantalan) untuk penyesuaian peningkatan dan gaji.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka pemikiran



Sumber: Halim, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang digunakan. Strategi menarik ini mencakup pengumpulan informasi untuk menguji spekulasi atau menjawab pertanyaan mengenai sudut pandang individu mengenai suatu isu atau subjek. Eksplorasi kuantitatif adalah penelitian dengan mempertimbangkan pengelompokan dan pemeriksaan informasi berupa angka-angka (*numerik*) untuk memahami, mengantisipasi, dan mengendalikan kekhasan yang diminati. Eksplorasi kuantitatif menggarisbawahi pemeriksaan informasi matematika yang ditangani dengan menggunakan teknik faktual. Dengan strategi kuantitatif akan diperoleh makna hubungan antar faktor.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pemeriksaan ini selesai di Kantor Pejabat Rezim Mamasa, Alamat Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Wilayah Sulawesi Barat. Perkiraan waktu pengumpulan informasi untuk eksplorasi ini diperkirakan memakan waktu sekitar 1 (satu) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah spekulasi yang terdiri dari; benda/subyek yang mempunyai ciri-ciri tertentu tidak seluruhnya ditetapkan oleh para ilmuwan untuk dikonsentrasikan dan kemudian dicapai penentuannya. Populasi juga bukan sekedar jumlah item/subyek yang diteliti, namun mencakup seluruh atribut yang digerakkan oleh subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Informasi Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Daerah Mamasa.

Keteladanan ini penting karena jumlah dan kualitas yang digerakkan oleh masyarakat. Dengan asumsi bahwa populasinya sangat besar, dan tidak terbayangkan bagi para spesialis untuk berkonsentrasi pada semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan aset, tenaga dan waktu, maka contoh yang diambil dalam eksplorasi ini adalah mengambil informasi dari Pay and Use Financial. laporan rencana di Kantor Pejabat Peraturan Mamasa selama 3 (tiga) periode. setahun terakhir (2020-2022).

3.4 Pengukuran Variabel Penelitian

Pengukuran variable penelitian dimaksudkan pada pengukuran rasio keuangan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Proporsi kecukupan gaji daerah yang unik menggambarkan kemampuan daerah untuk menerima gaji unik provinsi yang diatur dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan kemampuan asli daerah tersebut. Negara bagian seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya dengan asumsi bahwa proporsi yang dicapai adalah sekitar 1 atau 100 persen, namun semakin tinggi proporsi kecukupannya, semakin baik kinerja pemerintah teritorialnya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100$$

Kriteria penentuan rasio Efektivitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	<60

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Proporsi efektivitas menggambarkan korelasi antara berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan gaji dan gaji sebenarnya yang didapat. Apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau kurang dari 100 persen, maka pemerintah daerah dikatakan efisien. Semakin kecil proporsi produktivitas berarti kinerja pemerintah daerah semakin membaik.

$$\text{Realisasi Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penentuan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<60%
Efisien	60% - 80%
Cukup Efisien	80% - 90%
Kurang Efisien	90% - 100%
Tidak Efisien	100% keatas

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan informasi merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui strategi pengumpulan informasi, spesialis tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman informasi yang ditetapkan. Prosedur pengumpulan informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu suatu strategi pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan dan menyelidiki catatan-catatan, baik tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumentasi lebih ditujukan pada pembuktian substansial mengenai efek

samping atau kekhasan yang akan dikonsentrasikan di lapangan. Dokumentasi diharapkan dapat mengumpulkan informasi dengan melihat laporan-laporan yang berhubungan dengan hal yang diteliti. Dalam hal ini dengan cara menyalin Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Bupati Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022. Untuk itu, dengan cara menggandakan dokumen informasi laporan Rencana Keuangan Pendapatan dan Penggunaan Kantor Pejabat Pemerintahan Mamasa Tahun 2020-2022. Selain metode dokumentasi, para ilmuwan juga menggunakan perpustakaan (*library riset*), yaitu dengan membaca dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber perpustakaan yang erat kaitannya dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan lebih banyak data luar dan dalam terhadap objek yang diteliti.

3.6 Analisis Data

Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah teknik *Quantitative Elucidating* dengan cara menggambarkan atau menguraikan informasi yang telah dikumpulkan untuk apa manfaatnya tanpa bermaksud membuat tujuan umum atau spekulasi (Sugyono, 2019). Dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022, data kuantitatif dapat berupa anggaran pendapatan dan belanja serta realisasinya yang digunakan untuk menetapkan konsep penghitungan rasio keuangan dalam mengukur efektivitas. rasio realisasi anggaran

Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini sebagai berikut:

- a. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi
- b. Mendeskripsikan data hasil perhitungan
- c. Membandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten mamasa tahun 2020-2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Gambaran umum DPKAD Kabupaten Mamasa

Dewan Pendapatan dan Uang Daerah Provinsi (DPKAD) Peraturan Mamasa merupakan salah satu Perkumpulan Penataan Wilayah dalam lingkup Pemerintahan Rezim Mamasa yang berperan sebagai sekutu dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Uang Daerah, dan digerakkan oleh suatu organisasi. memimpin dan memperhatikan Pejabat melalui Sekretaris Wilayah Pemerintahan Mamasa. Dalam hal ini Peraturan Bupati Mamasa Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamasa Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Struktural Kabupaten Mamasa.

Menimbang :

- a. A. Bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Rezim Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggabungan Perangkat Daerah Pemerintahan Mamasa (Surat Wilayah Rezim Mamasa Tahun 2014 Nomor 148), dipandang perlu untuk menetapkan Kewajiban Pokok dan Kesanggupan serta Seluk-beluk Kewajiban Rezim Mamasa. Tempat Utama Badan Moneter dan Sumber Daya Provinsi Badan Administrasi Rezim Mamasa;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu di tetapkan pada dengan Peraturan Bupati Mamasa;

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- b. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 - e. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 - f. Tambahan Surat Kabar Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diperbaiki, terakhir dengan Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- h. Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 100 Tahun 2000 tentang Penataan Pegawai Pemerintah pada Jabatan Utama (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 13 Tahun Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 100 Tahun 2000 tentang Penataan Pegawai Pemerintah pada Jabatan Mendasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- i. Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ahli Penataan, Pemindehan dan Pembebasan Pegawai Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 15 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ahli Penataan, Pemindehan dan Pembebasan Pegawai Pemerintah (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 164);
- j. Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Badan Umum, Badan Legislatif Daerah Provinsi dan Daerah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 41 Tahun 2007 tentang Peraturan Perkumpulan Majelis Mekanik Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- l. aku. Undang-Undang Tidak Resmi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pendokumentasian dan Pertolongan (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- n. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. *Guideline of the Pastor of Home Undertakings Number 57 of 2007 concerning Specialized Directions for Organizing Provincial Device Associations as changed by Guideline of the Clergyman of Home Issues Number 56 of 2010 concerning Corrections to Guideline of the Priest of Home Issues Number 57 of 2007 concerning Specialized Guidelines for Organizing Local Contraction Associations (State Periodical of the Republic of Indonesia 2010 Number 537);*
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 22 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2014 Nomor 148).

4.1.2 Visi dan Misi BPKPD kabupaten Mamasa

a. Visi

Memahami masyarakat bebas dalam kehidupan yang adil, berbasis popularitas, dan sejahtera.

b. Misi

- 1) mencapai kemandirian ekonomi melalui pembangunan berkelanjutan dan perekonomian kerakyatan.
- 2) Menumbuhkan lingkungan usaha yang bermanfaat

- 3) Mengkoordinasikan/memberikan pelayanan kesejahteraan dan pengajaran yang wajar, tidak memihak dan bermutu.
- 4) Membentuk landasan dan dukungan keuangan yang memadai;
- 5) Pengakuan mamasa sebagai lokasi wisata (Lokasi Industri Perjalanan Wisata)
- 6) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan administrasi yang bersih..

4.1.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Konstruksi Hierarki Rezim Mamasa Uang dan Pendapatan Teritorial Para eksekutif Administrasi, Desain Otoritatif dari Moneter dan Sumber Daya Lokal Kantor dewan terdiri dari:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.1.4 Jabatan pengurus DPKD Kabupaten Mamasa

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- e. Sub bagian keuangan
- f. Kepala bidang anggaran
- g. Seksi belanja langsung dan tidak langsung
- h. Seksi anggaran pendapatan dan pembiayaan
- i. Bagian Keempat Bidang Perbendaharaan
- j. Seksi Pengelolaan Belanja Pegawai
- k. Seksi pengelolaan belanja non pegawai
- l. Verifikasi dan Akuntansi
- m. Seksi verifikasi
- n. Seksi akuntansi dan pelaporan
- o. Bidang Aset
- p. Seksi Perencanaan Kebutuhan
- q. Seksi inventarisasi dan pengawasan

4.1.5 Sumber Daya BPKPD Kabupaten Mamasa

Komposisi gender Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa menunjukkan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022

APBD merupakan anggaran tahunan pemerintah daerah yang dibicarakan dan disahkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah (DPRD) yang masih dirumuskan melalui Pedoman Provinsi yang disusun sesuai kebutuhan organisasi pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, kesiapan rancangan APBD diarahkan oleh undang-undang tidak resmi teritorial untuk memahami pencapaian tujuan Negara.

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Teritorial adalah semua penerimaan uang daerah provinsi yang nilai kenaikannya dan pada tahun rencana pengeluaran yang berlaku merupakan kebebasan pemerintah daerah, dan tidak perlu repot untuk dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. .

Pembicaraan dan dampak pendalaman ini akan membahas mengenai tingkat kelayakan dan produktivitas rencana belanja pendapatan dan konsumsi daerah Mamasa tahun 2020-2022. Rencana keuangan teritorial juga digunakan sebagai alat untuk memutuskan berapa banyak gaji dan konsumsi, membantu arahan dan pengaturan perbaikan, menyetujui penggunaan di masa depan, titik pusat untuk membuat alat ukur penilaian kerja standar, instrumen untuk membangkitkan perwakilan, dan alat koordinasi untuk pergerakan setiap orang. jenis unit kerja yang berbeda.

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Gaji khas daerah (Batal) adalah semua pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber dan dalam daerahnya sendiri yang dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai dengan peraturan dan pedoman materiil (Halim, 2004:96). Daerah pembayaran provinsi memegang peranan penting, karena melalui daerah ini dapat diketahui seberapa besar suatu daerah dapat

mendanai kegiatan pemerintahan dan pergantian wilayah. Berikutnya adalah tabel Pembayaran Lokal Unik Peraturan Mamasa untuk tahun 2020-2022.

Tabel 4.1
Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah	5,085,800,477	4,297,034,538	5,940,656,902
2	Retribusi Daerah	6,235,267,556	5,269,398,711	6,843,117,692
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan	2,898,322,127	2,805,366,949	3,330,179,316
4	Lain-lain PAD yang Sah	16,925,253,072	4,271,939,267	3,191,926,970
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		31,144,643,233	16,643,739,465	19,305,880,880

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas menunjukkan nilai realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten Mamasa tahun anggaran 2020-2022 mengalami fluktuasi. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 Rp 31,144,643,233, kemudian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 16,643,739,465 atau turun sebesar 53,4% karena pada tahun 2021 pemerintah kabupaten kota Mamasa melakukan penghematan anggaran setelah pemulihan masa Covid-19 dan tahun 2022 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp 19,305,880,880 atau meningkat sebesar 86,2% yang dimana pemerintah melakukan *recovery* terhadap Sumber daya manusia dalam hal ini adalah para pelaku usaha yang dapat membantu perekonomian Kabupaten Mamasa.

b. Realisasi Pendapatan Transfer

Dalam konteks desentralisasi, pendapatan transfer yang disebut juga dana perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh dari entitas lain, seperti pemerintah pusat atau pemerintah daerah otonom lainnya. Dalam konteks desentralisasi, transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disebut sebagai “dana perimbangan”. Berikut ini adalah tabel pembayaran pindahan Mamasa Rule tahun 2020-2022

Tabel 4.2
Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Transfer T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Dana Perimbangan	683,870,270,51	666,415,280,926	
2	Dana Insentif Daerah (DID)	14,452,365,000	7,148,713,000	
3	Dana Desa	146,877,495,000	146,768,819,000	
4	Pendapatan Transfer Antar Daerah	17,891,520,653	15,594,154,002	
5	Pendapatan Bagi Hasil	14,891,520,653	15,594,154,002	27,532,137,492
6	Bantuan Keuangan	3,000,000,000	-	1,034,251,000
9	Dana Alokasi Umum			489,695,520,000
10	Dana Alokasi Khusus			170,626,664,383
11	Dana Penyesuaian			139,651,360,000
	Jumlah	845,200,130,511	820,332,812,926	670,513,057,981

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan transfer pemerintah kabupaten Mamasa Mengalami penurunan dari tahun 2020-2022. Realisasi pendapatan transfer periode tahun 2020 sebesar Rp 845,200,130,511 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 820,332,812,926 atau menurun sebesar 2,95% dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 670,513,057,981 atau menurun sebesar 18,27%. Pada tahun 2021 pendapatan transfer menurun dikarenakan pemerintah tidak mendapatkan bantuan keuangan dibandingkan tahun 2020 masa covid-19 dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan karena di tahun tersebut tidak adanya pendapatan transfer berupa Dana perimbangan, dana insentif dan dana desa dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Digunakan untuk kegiatan konsumsi provinsi yang dikembangkan oleh daerah dengan cara yang bijaksana dan tidak mengabaikan pedoman yang

relevan. Berikutnya adalah tabel Gaji Asli Rezim Mamasa Tahun 2020-2022.

Tabel 4.3
Ringkasan Laporan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Pendapatan Hibah	42,361,053,723	16,642,034,700	14,445,480,105
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	30,762,590,739	-
Jumlah		42,361,053,723	47,404,625,439	14,445,480,105

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2020 sampai pada tahun 2022 mengalami fluktuasi yaitu masing-masing sebesar di tahun 2020 sebesar Rp 42,361,053,723 kemudian mengalami kenaikan 10,64% di tahun 2021 sebesar Rp 47,404,625,439. Sedangkan ditahun 2022 kembali mengalami penurunan yaitu Rp 14,445,480,105 atau sebesar 69,53%. Pemerintah kabupaten Mamaasa dalam pendapatan yang sah di tahun 2021 meningkat karena di tahun 2021 mendapatkan pendapatan yang berasal dari ketentuan perundang-undangan untuk penggunaan masa pemulihan pasca Covid-19.

d. Realisasi Belanja Operasi

Belanja fungsional adalah konsumsi sehari-hari bagi pemerintahan daerah yang memberikan keuntungan sesaat. Berikut informasi tabel konsumsi fungsional wilayah Mamasa tahun anggaran 2020-2022.

Tabel 4.4
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Operasi T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Belanja Pegawai	340.348.829.923	343.021.980.654	340.103.491.937
2	Belanja Barang dan Jasa	231.482.875.188	212.210.411.935	215.685.663.136
3	Belanja Bunga		227.059.000	3.491.444.869
4	Belanja Hibah	38.374.317.000	48.557.657.860	36.554.173.540
5	Belanja Bantuan Sosial		1.435.700.000	16.165.702.600
Jumlah		610.206.022.111	605.452.809.449	612.000.476.082

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja operasi pemerintah Kabupaten Mamasa Mengalami penurunan dari tahun 2020-2022, kecuali tahun 2022 kembali mengalam kenaikan. Realisasi belanja operasi periode tahun 2020 sebesar Rp 610.206.022.111 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 605.452.809.449 atau turun sebesar 0,78% dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp 612.000.476.082 atau meningkat sebesar 1,07%. Pada tahun 2022 merupakan tahun dengan belanja operasi tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

e. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal untuk menambah aktiva tetap atau persediaan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini mencakup biaya pemeliharaan untuk mempertahankan atau memperpanjang masa manfaat aset dan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.

Berikutnya adalah informasi pengakuan penggunaan modal pemerintah Peraturan Mamasa tahun anggaran 2020-2022.

Tabel 4.5
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Modal T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Belanja Modal Tanah	5.771.771.500	6.775.000.000	5.247.564.000
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.797.172.866	17.859.059.445	13.935.561.136
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.374.120.092	13.422.080.476	35.012.388.195
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.233.224.297	25.321.000.493	77.092.850.559
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.562.505.903	33.373.541.683	4.132.942.484
Jumlah		118.738.794.658	96.750.682.097	135.421.306.374

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 118.738.794.658 dan Rp 96.750.682.097 atau turun sebesar 18,52% sedangkan di tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 135.421.306.374 atau meningkat sebesar 28,56%. Tahun 2022 pemerintah kabupaten kota Mamasa melakukan pembelanjaan modal tertinggi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pembangunan daerah dan pemenuhan pelayanan publik yang baik. Peningkatan belanja modal oleh pemerintah kabupaten Mamasa menjadi salah satu faktor peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupate Mamasa.

f. Realisasi Belanja Tak Terduga

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diperkirakan akan terulang kembali disebut pengeluaran tak terduga. Contoh belanja tak terduga antara lain untuk menangani bencana sosial dan bencana alam, serta belanja tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat atau daerah.

Berikutnya adalah informasi pengakuan penggunaan mengejutkan yang

dilakukan pemerintah Peraturan Mamasa untuk tahun anggaran 2020-2022..

Tabel 4.6
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Belanja Tidak Terduga	27.097.712.090	22.599.059.550	15.900.000.000
Jumlah		27.097.712.090	22.599.059.550	15.900.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja tak terduga pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Realisasi belanja tak terduga periode tahun 2020 sebesar Rp 27.097.712.090 tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 22.599.059.550 atau 16,61% dan di tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar Rp 15.900.000.000 atau turun sebesar 29,65%. Tahun 2020 merupakan tahun tertinggi dengan realisasi belanja tak terduga dikarenakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam Covid-19 yang melanda, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Mamasa.

g. Realisasi Belanja Transfer

Move Use adalah konsumsi melalui pembakaran uang tunai atau komitmen untuk membakar uang dari suatu hal yang bersifat rinci menjadi suatu unsur yang lebih terbuka sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berikutnya informasi pengakuan belanja pemerintah Rezim Mamasa tahun anggaran 2020-2022.

Tabel 4.7
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Transfer T.A 2020-2022

No	Keterangan	2020	2021	2022
	Belanja Bantuan Keuangan	191,814,103,596	200,607,598,200	189,547,359,200
	Jumlah	191,814,103,596	200,607,598,200	189,547,359,200

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja transfer bantuan tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 191,814,103,596 dan Rp 200,607,598,200 atau meningkat sebesar 4,39% sedangkan di tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 189,547,359,200 atau menurun sebesar 5,52%. Pada tahun 2021 penggunaan belanja transfer tertinggi yang mana pada kabupaten Mamasa menggunakan guna mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas layanan publik di Kabupaten Mamasa.

4.2.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Hansen, Ladies (2012:229) dalam laporan pertanggungjawaban mempunyai empat (4) komponen penting yaitu mendelegasikan tanggung jawab, melakukan tindakan pelaksanaan atau *benchmarking*, menilai pelaksanaan dan pemberian penghargaan.

Laporan realisasi didefinisikan sebagai berikut oleh Hansen, Women (2005:116): "laporan kewajiban adalah kerangka kerja yang tindakan berbagai hasil yang dicapai oleh setiap kewajiban ditempatkan sesuai data yang dibutuhkan oleh kepala untuk mengerjakan komunitas kewajibannya".

Laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur organisasi menjadi beberapa bagian atau pusat pertanggungjawaban dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas,

sebagaimana didefinisikan di atas. Dari setiap komunitas obligasi dikumpulkan inkonsistensi dan terungkap apakah terdapat kekurangan atau kelebihan rencana keuangan terkait dengan pengakuan rencana keuangan.

Berikut ini adalah laporan pertanggungjawaban pemanfaatan rencana keuangan Peraturan Mamasa tahun 2020-2022.

Tabel 4.8
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2020

Keterangan	Jumlah	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	950.798.541.214	936.597.348.120
Pendapatan Asli Daerah	32.374.434.935	31.144.643.233
Pendapatan Transfer	867.008.688.478	863.091.651.164
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	51.415.417.801	42.361.053.723
Belanja	988.011.783.126	947.218.415.455
Belanja Operasi	827.205.142.544	801.381.908.707
Belanja Modal	131.709.421.342	118.738.794.658
Belanja Tidak Terduga	29.097.219.239	27.097.712.090
Transfer	638.617.000	638.217.000
Pembiayaan	37.851.858.911	14.979.047.462
Penerimaan Daerah	38.406.232.047	15.523.420.598
Pengeluaran Daerah	554.373.136	544.373.136

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2020 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp 950.798.541.214 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 936.597.348.120.

Anggaran belanja sebesar Rp 988.011.783.126 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 947.218.415.455. Anggaran pembiayaan sebesar Rp 37.851.858.911 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 14.979.047.462. Pada anggaran tahun 2020 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 4.9
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2021

Keterangan	Jumlah	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	904.871.875.108	899.975.331.832
Pendapatan Asli Daerah	23.343.161.766	16.643.739.465
Pendapatan Transfer	834.188.975.341	835.926.966.928
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	47.339.738.000	47.404.625.439
Belanja	1.053.665.638.363	925.410.149.297
Belanja Operasi	634.879.289.575	605.452.809.449
Belanja Modal	185.066.161.088	96.750.682.097
Belanja Tidak Terduga	22.600.000.000	22.599.059.550
Transfer	211.120.187.700	200.607.598.200
Pembiayaan	148.793.763.255	26.682.347.784
Penerimaan Daerah	151.293.763.255	28.182.347.784
Pengeluaran Daerah	2.500.000.000	1.500.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Mamasa tahun 2021 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp 904.871.875.108 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 899.975.331.832. Anggaran belanja sebesar Rp 1.053.665.638.363 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 925.410.149.297.

Anggaran pembiayaan sebesar Rp 148.793.763.255 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 26.682.347.784. Pada anggaran tahun 2021 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tabel 4.10
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2022

Keterangan	Jumlah	
	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	905.123.825.297	862.291.293.860
Pendapatan Asli Daerah	31.688.367.590	19.305.880.880
Pendapatan Transfer	858.435.457.707	828.539.932.875
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	15.000.000.000	14.445.480.105
Belanja	1.123.151.318.568	952.869.141.656
Belanja Operasi	707.855.391.845	612.000.476.082
Belanja Modal	209.757.327.723	135.421.306.374
Belanja Tidak Terduga	15.900.000.000	15.900.000.000
Transfer	189.638.599.000	189.547.359.200
Pembiayaan	218.027.493.271	91.301.446.291
Penerimaan Daerah	219.527.493.271	91.801.446.291
Pengeluaran Daerah	1.500.000.000	500.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Mamasa

Dari Tabel diatas laporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten Mamasa tahun 2022 terdapat adanya selisih antara anggaran pendapatan sebesar Rp 905.123.825.297 dan realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp 862.291.293.860.

Anggaran belanja sebesar Rp 1.123.151.318.568 dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 952.869.141.656.

Anggaran pembiayaan sebesar Rp 218.027.493.271 dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 91.301.446.291 Pada anggaran tahun 2022 adanya kenaikan dan penurunan dana dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.2.3 Perhitungan dan Analisis Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Proporsi kelayakan upah unik lokal ini ditentukan dengan membandingkan pengakuan pendapatan Bantal dan pendapatan Bantal yang direncanakan (yang direncanakan). Kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan PAD sesuai dengan tujuan ditunjukkan melalui pendapatan daerah.

Berikut ini tabel perhitungan efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Mamasa :

Tabel 4. 11
Kriteria Tingkat Efektif Penerimaan PAD

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

4.2.4 Efisien Belanja Daerah

Proporsi belanja efektif merupakan pemeriksaan antara belanja riil dengan rencana keuangan belanja. Proporsi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana cadangan rencana belanja yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah setempat dianggap telah melaksanakan efisiensi rencana belanja apabila proporsi produktivitasnya di bawah 100 persen. Sebaliknya jika melebihi 100 persen berarti pemborosan anggaran (Mahmdui, 2007: 152).

Efisien belanja dapat diukur dengan Rumus:

Rasio Efisien Belanja =	Realisasi Anggaran	x100%
	Anggaran Belanja	

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Tabel: 4.12
Kriteria Tingkat Efisien Belanja Secara Umum

Kategori	Predikat
Tidak efisien	>100%
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	< 60%

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berikut ini tabel perhitungan Efektif Pendapatan Daerah Kab Mamasa.

- a. Ringkasan dan perhitungan Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2020

Tabel 4.13
Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa 2020

Keterangan	Jumlah		Selisih	%
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	950,798,541,214	936,597,348,120	14,201,193,094	98.51
Pendapatan Asli Daerah	32,374,434,935	31,144,643,233	1,229,791,702	96.20
Pendapatan Transfer	867,008,688,478	863,091,651,164	3,917,037,314	99.55
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	51,415,417,801	42,361,053,723	9,054,364,078	82.39
Belanja	988,011,783,126	947,218,415,455	40,793,367,671	95.87
Belanja Operasi	827,205,142,544	801,381,908,707	25,823,233,837	96.88
Belanja Modal	131,709,421,342	118,738,794,658	12,970,626,684	90.15
Belanja Tidak Terduga	29,097,219,239	27,097,712,090	1,999,507,149	93.13
Transfer	638,617,000	638,217,000	400,000	99.94
Pembiayaan	37,851,858,911	14,979,047,462	22,872,811,449	39.57
Penerimaan Daerah	38,406,232,047	15,523,420,598	22,882,811,449	40.42
Pengeluaran Daerah	554,373,136	544,373,136	10,000,000	98.20
Rata-rata belanja dan Pembiayaan				85.90

Sumber: Data Diolah, 2023

1) Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran Belanja PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{936,597,348,120}{950,798,541,214} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 98.51\%$$

Dari perhitungan persentase gaji wajib di atas terlihat bahwa rencana keuangan sebenarnya lebih kecil dibandingkan target rencana keuangan sehingga tercapai tingkat yang kuat sebesar 98,51%.

2) Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{947,218,415,455}{988,011,783,126} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 95,87\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{947,218,415,455}{988,011,783,126} \times 100\%$$

$$\text{Belanja operasi} = 96,88\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{118,738,794,658}{131,709,421,342} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 90,15\%$$

$$\text{Belanja Tidak Terduga} = \frac{27,097,712,090}{29,097,219,239} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak terduga} = 93,13\%$$

$$\text{Transfer} = \frac{638,217,000}{638,617,000} \times 100\%$$

$$\text{Transfer} = 99,94\%$$

$$\text{Pembiayaan} = \frac{14,979,047,462}{37,851,858,911} \times 100\%$$

$$\text{Pembiayaan} = 39,57\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = \frac{15,523,420,598}{38,406,232,047} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = 40,42\%$$

$$\text{Pengeluaran Daerah} = \frac{15,523,420,598}{38,406,232,047} \times 100\%$$

Pengeluaran Daerah = 98,20%

Berdasarkan perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masingmasing memiliki rasio efisien sebesar 95,87%, 96,88%, 90,15%, 93,13%, 99,94%, 39,57%, 40,42%, dan 98,20%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 85.90%, sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 85,90\% = 14,1\%$. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mamasa telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2020.

- b. Ringkasan dan perhitungan Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2021

Tabel 4.14
Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa 2021

Keterangan	Jumlah		Selisih	%
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	904,871,875,108	899,975,331,832	4,896,543,276	99.46
Pendapatan Asli Daerah	23,343,161,766	16,643,739,465	6,699,422,301	71.30
Pendapatan Transfer	834,188,975,341	835,926,966,928	-1,737,991,587	100.21
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	47,339,738,000	47,404,625,439	-64,887,439	100.14
Belanja	1,053,665,638,363	925,410,149,297	128,255,489,066	87.83
Belanja Operasi	634,879,289,575	605,452,809,449	29,426,480,126	95.37
Belanja Modal	185,066,161,088	96,750,682,097	88,315,478,991	52.28
Belanja Tidak Terduga	22,600,000,000	22,599,059,550	940,450	100.00
Transfer	211,120,187,700	200,607,598,200	10,512,589,500	95.02
Pembiayaan	148,793,763,255	26,682,347,784	122,111,415,471	17.93
Penerimaan Daerah	151,293,763,255	28,182,347,784	123,111,415,471	18.63
Pengeluaran Daerah	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000	60.00
Rata-rata belanja dan Pembiayaan				74.85

Sumber: Data Diolah, 2023

1) Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran Belanja PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{899,975,331,832}{904,871,875,108} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 99,46\%$$

Dari perkiraan proporsi gaji yang menarik di atas, terlihat bahwa pengakuan rencana belanja lebih menonjol dibandingkan target rencana belanja sehingga tingkat keberhasilan tercapai sebesar 99,46%. Itu menyiratkan pemerintah daerah. Mamas sangat menarik dalam memahami rencana keuangannya.

2) Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{925,410,149,297}{1,053,665,638,363} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 87,83\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{605,452,809,449}{634,879,289,575} \times 100\%$$

$$\text{Belanja operasi} = 95,37\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{96,750,682,097}{185,066,161,088} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 52,28\%$$

$$\text{Belanja Tidak Terduga} = \frac{22,599,059,550}{22,600,000,000} \times 100\%$$

Belanja Tidak terduga= 100%

$$\text{Transfer} = \frac{200,607,598,200}{211,120,187,700} \times 100\%$$

Transfer = 95,02%

$$\text{Pembiayaan} = \frac{26,682,347,784}{148,793,763,255} \times 100\%$$

Pembiayaan = 17,93%

$$\text{Penerimaan Daerah} = \frac{28,182,347,784}{151,293,763,255} \times 100\%$$

Penerimaan Daerah = 18,63%

$$\text{Pengeluaran Daerah} = \frac{1,500,000,000}{2,500,000,000} \times 100\%$$

Pengeluaran Daerah = 60,00%

Berdasarkan perhitungan rasio efisien atas menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 87,83%, 95,37%, 52,28%, 100%, 95,02%, 17,93% , 18,63%, dan 60,00%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 74,85% sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 74,85\% = 25,15\%$. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Mamasa telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2021.

- c. Ringkasan dan perhitungan Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2022

Tabel 4.15
Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Mamasa 2022

Keterangan	Jumlah		Selisih	%
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan	905,123,825,297	862,291,293,860	42,832,531,437	95.27
Pendapatan Asli Daerah	31,688,367,590	19,305,880,880	12,382,486,710	60.92
Pendapatan Transfer	858,435,457,707	828,539,932,875	29,895,524,832	96.52
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	15,000,000,000	14,445,480,105	554,519,895	96.30
Belanja	1,123,151,318,568	952,869,141,656	170,282,176,912	84.84
Belanja Operasi	707,855,391,845	612,000,476,082	95,854,915,763	86.46
Belanja Modal	209,757,327,723	135,421,306,374	74,336,021,349	64.56
Belanja Tidak Terduga	15,900,000,000	15,900,000,000	0	100.00
Transfer	189,638,599,000	189,547,359,200	91,239,800	99.95
Pembiayaan	218,027,493,271	91,301,446,291	126,726,046,980	41.88
Penerimaan Daerah	219,527,493,271	91,801,446,291	127,726,046,980	41.82
Pengeluaran Daerah	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	33.33
Rata-rata belanja dan Pembiayaan				75.15

Sumber: Data Diolah, 2023

1) Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran Belanja PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif Belanja} = \frac{862,291,293,860}{905,123,825,297} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 95,27\%$$

Dari perkiraan proporsi gaji yang menarik di atas, terlihat bahwa pengakuan rencana belanja lebih menonjol dibandingkan target rencana belanja sehingga tingkat keberhasilan tercapai sebesar 99,46%. Itu menyiratkan pemerintah daerah. Mamasa sangat pandai memahami anggarannya.

2) Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{952,869,141,656}{1,123,151,318,568} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 84,84\%$$

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{612,000,476,082}{707,855,391,845} \times 100\%$$

$$\text{Belanja operasi} = 86,46\%$$

$$\text{Belanja Modal} = \frac{135,421,306,374}{209,757,327,723} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 64,56\%$$

$$\text{Belanja Tidak Terduga} = \frac{15,900,000,000}{15,900,000,000} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak terduga} = 100\%$$

$$\text{Transfer} = \frac{189,547,359,200}{189,638,599,000} \times 100\%$$

$$\text{Transfer} = 99,95\%$$

$$\text{Pembiayaan} = \frac{91,301,446,291}{218,027,493,271} \times 100\%$$

$$\text{Pembiayaan} = 41,88\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = \frac{91,801,446,291}{219,527,493,271} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = 41,82\%$$

$$\text{Pengeluaran Daerah} = \frac{500,000,000}{1,500,000,000} \times 100\%$$

$$\text{Pengeluaran Daerah} = 33,33\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisien di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 84,84%, 86,46%, 64,56%, 100%, 99,95%, 41,88%, 41,82%, dan 33,33%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 75,15% sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 75,15\% = 24,85\%$. Sehingga dapat dikatakan

bahwa pemerintah Kabupaten Mamasa telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2022.

4.2.5 Rasio Efektif Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kab Mamasa Tahun 2020-2022

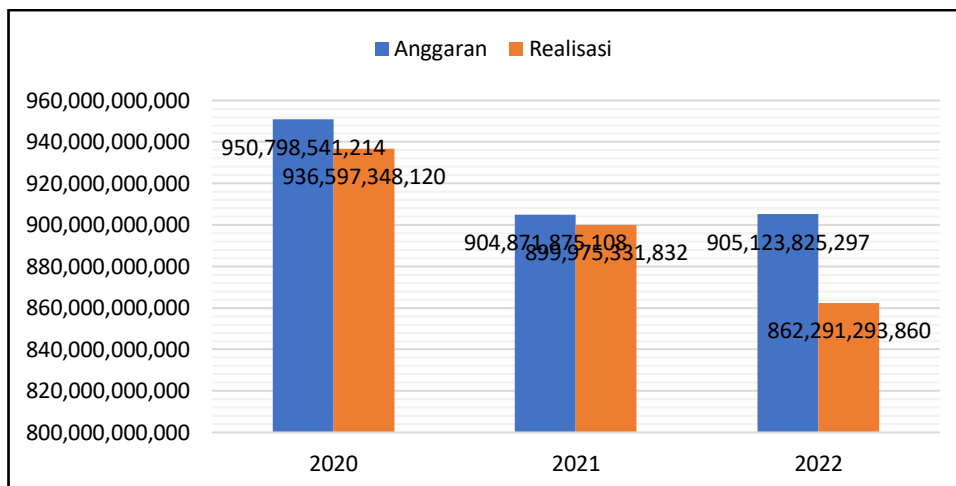
Tabel 4.16
Rasio Efektif Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Keb Mamasa Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)	Analisis Efektif
2020	950,798,541,214	936,597,348,120	98,51	Efektif
2021	904,871,875,108	899,975,331,832	99,46	Efektif
2022	905,123,825,297	862,291,293,860	95,27	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektif pendapatan pemerintah daerah kab. Mamasa Tahun 2020,2021 dan 2022 belum mencapai target namun dalam kategori sudah efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 98,51, 99,46 dan 95,27 Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan lebih kecil daripada target anggaran pendapatan.

**Grafik Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah kab. Mamasa Tahun
Anggaran 2020-2022**



Gambar 4.2 Grafik Anggaran pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022

Dilihat dari grafik pengakuan rencana keuangan pendapatan di atas terlihat bahwa pada tahun 2020-2022, pengakuan rencana keuangan pendapatan lebih sedikit dari jumlah yang direncanakan dan juga terlihat bahwa pada tahun 2020-2022 realisasi belanja pendapatan rencana dan pengakuannya telah berkurang. Khususnya pada tahun 2020 tingkat rencana keuangan pendapatan sebesar Rp. 950.798.541.214 sedangkan pengakuannya sebesar Rp. 936.597.348.120 atau 98,51% dari jumlah seluruhnya. Anggaran pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 904.871.875.108 sedangkan tarifnya lebih sederhana yaitu Rp. 899.975.331.832 dengan tingkat 99,46% Dan pada tahun 2022 rencana belanja pendapatan sebesar Rp. 905.123.825.297 dan pengakuannya lebih sederhana yaitu Rp. 862.291.293.860 dengan taraf 95,27%.

4.2.6 Rasio Efisien Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab Mamasa Tahun 2020-2022.

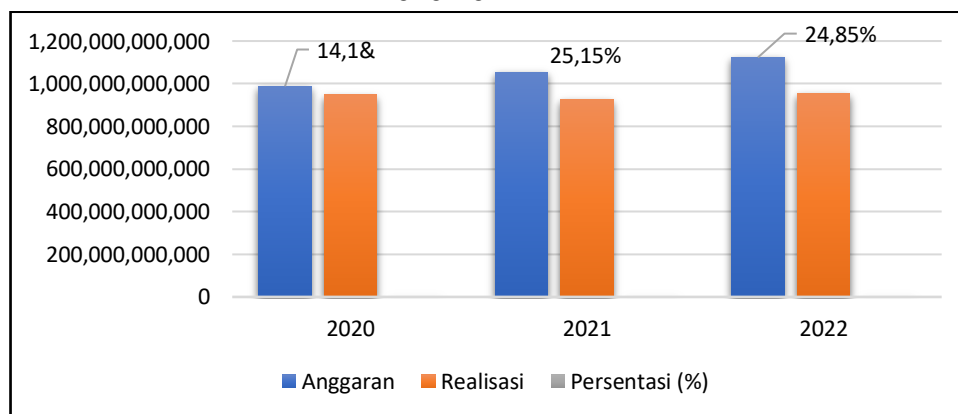
Tabel 4.17
Rasio Efisien Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab Mamasa Tahun 2020-2022.

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Rata-rata	Analisis Efektif
2020	988,011,783,126	947,218,415,455	14,1%	85,90	Sangat Efisien
2021	1,053,665,638,363	925,410,149,297	25,15%	74,85	Sangat Efisien
2022	1,123,151,318,568	952,869,141,656	24,85%	75,15	Sangat Efisien

Sumber: Data Diolah, 2023

Rasio efisien belanja pemerintah daerah terhadap belanja pemerintah daerah ditunjukkan pada tabel di atas. Mamasa tahun 2020-2022 dinilai sangat efektif dalam mengakui pengeluaran karena dapat lebih berhemat dengan proporsi produktif sebesar 14,1%, 25,15% dan 24,85%.

Rasio Efisien Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab Mamasa Tahun 2020-2022.



Gambar 4.3 Grafik Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2020-2022

Mengingat bagan Rencana Keuangan Konsumsi Pemerintah Daerah Provinsi. Mamasa tahun 2020-2022 lalu menunjukkan bahwa anggaran belanja riil lebih kecil dibandingkan anggaran konsumsi. Selain itu juga terlihat bahwa rencana belanja konsumsi dan pengakuannya mengalami perubahan total pada tahun 2020, yaitu rencana keuangan sebesar Rp. Dengan realisasi sebesar Rp

988.011.783.126 947.218.415.455 dengan tingkat 14,1% maka pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar Rp. 1.053.665.638.363 dengan pengakuan Rp. 925.410.149.297 dengan taraf 25,15%. Sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.123.151.318.568 dan hasilnya Rp. 952.869.141.656 atau 24,85% dari jumlah seluruhnya.

4.3 Pembahasan

Rencana pengeluaran berisi rencana tindakan yang diperkenalkan sebagai rencana pembayaran dan penggunaan di unit keuangan. Dalam strukturnya yang paling sederhana, rencana pengeluaran adalah catatan yang menggambarkan keadaan moneter suatu asosiasi termasuk data mengenai pembayaran, penggunaan, dan pelaksanaan (Mardiasmo, 2012).

4.3.1 Rasio Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kab. Mamasa Tahun 2020-2022

Proporsi Kelayakan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Mamasa dalam memahami rencana keuangan pendapatan yang disusun dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan semakin baik direalisasikan semakin tinggi rasio efektivitasnya. Angka-angka dalam laporan realisasi anggaran pendapatan tiga tahun 2020-2022 menjadi dasar perhitungan efektivitas anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Rencana kegiatan dalam anggaran disajikan sebagai rencana pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam strukturnya yang paling sederhana, rencana pengeluaran adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan, yang mencakup data tentang pendapatan, konsumsi, dan aktivitas.

Dengan asumsi rencana belanja pendapatan lebih kecil dari pada pengakuan maka rencana keuangan tersebut berhasil, sedangkan jika rencana

belanja pendapatan lebih besar maka rencana belanja tersebut sangat layak atau bahkan tidak mencukupi. Kelangsungan rencana belanja konsumsi berbanding terbalik dengan rencana belanja berbayar, yaitu dengan asumsi rencana belanja penggunaan lebih menonjol dibandingkan dengan pengakuan, maka rencana belanja tersebut produktif, dan dengan asumsi bahwa rencana keuangan penggunaan lebih sederhana dibandingkan dengan rencana belanja konsumsi. Pengakuannya, rencana belanja tersebut boros.

Dilihat dari perkiraan pameran moneter rencana belanja pendapatan Pemerintah Rezim Mamasa pada tabel 4.15 dengan proporsi kelayakan yang tampak sepanjang beberapa tahun terakhir, khususnya tahun 2020-2022, maka besarnya proporsi kecukupan anggaran pendapatan Pemerintahan Mamasa rencana secara umum akan meningkat namun pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan, pada tahun 2021 proporsi kecukupan mengalami peningkatan sebesar 9,36%, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,95% dan pada tahun 2022 kembali menurun sebesar 4,19%. Mengingat dampak penilaian penyajian keuangan rencana keuangan pendapatan Pemerintahan Pemerintahan Mamasa terhadap proporsi kelangsungan hidup secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir, hal ini cenderung dianggap sangat efektif karena fakta bahwa :

Mengingat dampak proporsi kelayakan rencana belanja pendapatan Pemerintah Rezim Mamasa tahun 2020 pada tabel 4.15 cenderung terlihat proporsi kecukupannya sebesar 98,51%, hal ini mengingat pada tahun 2020 direncanakan rencana keuangan pendapatan Pemerintahan Pemerintahan Mamasa sama kuatnya, karena nilai ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Pemerintahan Mamasa dapat mencapai target yang jelas.

Tabel 4.15 menunjukkan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2021 memiliki rasio efektivitas sebesar 99,46 persen. Hal ini

menandakan bahwa anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2021 dinilai sangat efektif karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 4.15 menunjukkan anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2022 memiliki rasio efektivitas sebesar 95,27 persen. Hal ini menandakan bahwa anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamasa tahun 2022 dinilai sangat efektif karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Mengingat dampak penelitian terhadap persentase keberhasilan anggaran pendapatan pada Pemerintah Daerah Rezim Mamasa Tahun 2020-2022 dinilai cukup kuat dalam menangani anggaran pendapatan yaitu 98,51%, 99,46% dan 95,27%. Level kekuatan tertinggi dicapai pada tahun 2021, tepatnya di angka 99,46. Eksplorasi ini sesuai dengan penelitian (Aisah, 2019) penelitian dampak Pemeriksaan Pemanfaatan Lokal pada Pemerintahan Pemerintahan Mamasa Ko Tahun Anggaran 2010-2016. Pemeriksaan proporsi kecukupan khususnya kelayakan tidak melampaui rencana pengeluaran dan penjajakan ini juga sesuai dengan penelitian (Rukayah et al., 2017) Laporan Pemeriksaan Pengakuan Rencana Pengeluaran Memanfaatkan Proporsi Sukses dan Proporsi Efektif di Tempat Kerja Organisasi Pemberi Koordinasi dan Kepentingan di Rezim Serang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proporsi yang layak adalah 102%, yang diingat karena peraturannya yang sangat kuat.

4.3.2 Rasio Efisien Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2020-2022.

Proporsi kemahiran menggambarkan perbandingan antara besarnya konsumsi yang disebabkan oleh Pemerintahan Pemerintahan Mamasa dengan penggunaan sebenarnya. Semakin rendah proporsi kecakapan, semakin baik pengakuan terhadap rencana keuangan konsumsi. Perkiraan produktivitas

rencana keuangan Pemerintah Rezim Mamasa bergantung pada angka-angka dalam laporan pengakuan rencana belanja untuk jangka waktu yang cukup lama, khususnya tahun 2020-2022.

Dampak peninjauan terhadap proporsi efektif belanja di DPRD Kab. Mamasa dinilai sangat produktif karena DPRD Provinsi Rezim Mamasa mempunyai kemampuan untuk mengatur anggaran belanja secara moneter pada tahun anggaran 2020-2022. Berdasarkan perkiraan penyajian moneter rencana belanja Pemerintah Rezim Mamasa dengan proporsi efektivitas pada tabel 4.16, ternyata sepanjang tiga tahun sebelumnya, khususnya tahun 2020-2022, tingkat proporsi produktivitas Pemerintahan Pemerintahan Mamasa mengalami perubahan seluruhnya. Hal ini ditunjukkan dengan diketahuinya penggunaan anggaran Rezim Mamasa yang tidak melampaui penggunaan anggaran. Proporsi yang mahir memanfaatkan rencana belanja konsumsi tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah sebesar 14,1%, 25,15%, dan 24,85%.

Oleh karena itu, proporsi moneter teritorial Peraturan Mamasa diharapkan berlaku efektif pada tahun anggaran 2020-2022 dengan besaran sebesar 85,90% pada tahun 2020, 74,85% pada tahun 2021, dan 83,17% pada tahun 2022, serta presentasi pemerintahan Rezim Mamasa. belanja negara seharusnya sangat produktif pada tahun 2020-2022.

Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja (Studi Kasus Kantor Bupati Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara) (Fatmala, 2020) juga sejalan dengan penelitian ini. Akibat dari pemeriksaan terhadap proporsi produktivitas Kantor Kecamatan Pakue tahun 2017-2019 semakin meluas sehingga dapat diartikan efektivitas dan pendalaman ini juga tidak sesuai dengan penelitian (Rukayah et al., 2017) Investigasi Perencanaan Keuangan Laporan Pengakuan Menggunakan Proporsi Menarik dan Proporsi Profesional di Tempat Kerja Badan Perizinan Berbadan Hukum dan Spekulasi

Modal Pemerintahan Serang. Hasil pemeriksaan terhadap proporsi mahir harus dilihat dari perhitungan tipikal proporsi produktif yaitu sebesar 92%, termasuk Tindakan yang kurang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengingat pemeriksaan informasi percakapan yang telah direncanakan. Hasilnya, dapat ditarik hal-hal berikut:

1. Tingkat keberhasilan gaji dari DPRD Provinsi Perda Mamasa tahun anggaran 2020-2022 sudah sampai pada golongan berkuasa karena berada pada predikat penilaian > 90-100 persen, hal ini harus terlihat dari ukuran yang lebih menonjol. rencana pengeluaran pendapatan yang diakui dibandingkan dengan rencana keuangan yang ditetapkan pada tahun anggaran 2020-2022, yaitu 98,51% pada tahun 2020, 99,46% pada tahun 2021, dan 95,27% pada tahun 2022.
2. Tingkat kecakapan belanja pemerintah daerah Kab. Mamasa periode 2020-2022, Pemerintah Daerah Mamasa dinilai sudah siap melakukan penghematan penggunaan anggaran belanja secara efisien, hal ini terlihat dari tidak adanya angka-angka yang melampaui penggunaan anggaran belanja yang mampu menghemat anggaran konsumsi. sebesar 14,1%; 25,15%; 24,85%.

5.2 Saran

Mengingat telah selesainya hasil pemeriksaan dan hal-hal yang berkaitan dengan batasan eksplorasi, para analis memberikan imbauan kepada Pemerintah Provinsi Kab. Mamasa sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Mamasa terdekat diharapkan akan berupaya untuk lebih menumbuhkan peluang-peluang baru untuk tetap mengikuti perkembangan zaman di wilayah pemerintahan Pemerintahan Mamasa

karena sangat bermanfaat bagi kemajuan, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan akan semakin berkembang. kebebasan wilayah Rezim Mamasa dan menjaga eksekusi moneter yang besar.

2. Pada tingkat mahir belanja pemerintah daerah. Mamasa disarankan untuk menggunakan anggaran belanja secara hemat agar tujuan belanja dapat selalu tercapai secara efektif tanpa bergantung pada belanja transfer pemerintah.
3. Dipercaya bahwa para ilmuwan masa depan akan mengarahkan penelitian lebih detail dalam mengkaji informasi sehingga hasil pemeriksaan pasti lebih dapat diandalkan dan tepat dibandingkan ulasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, F.R., 2017. Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
- Aldy H. R. Pankey dkk, 2017. Kajian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011–2015
- Hadijah, N. Analisis Pengawasan Keuangan Terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran pada Kantor Bupati Kabupaten Jenepono.
- Halim, Nasir. 2006. [http://www.google.co.id/landasanteori.co.id/pengertian APBD](http://www.google.co.id/landasanteori.co.id/pengertian/APBD)
- Halim Abdul. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Irzamsani, 2016. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Mardiasmo. 2008. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, *Jl.Beo* 38-40 : ANDI Offset
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Masrah, W. Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Majene.
- Munandar, Utami. 2009. Akuntansi Sektor Publik : Jakarta. PT. Gramedia widiasarana.
- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2017). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan.
- Mahendri, P. V., Arsana, I., & Nurhayanti, K. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Sukawati Periode 2019-2021
- Nurhikma, r. analisis anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja (studi kasus dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pinrang) tahun 2020.
- Nafarin M. 2007. Penganggaran Perusahaan (Edisi 3). Jakarta. Salemba Empat.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45-56.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pandere, p. (2023). analisis pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah pada sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kab. gowa

Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembranatahun.

Sutrisno, A., & Diana, L. (2022). Analisis Alokasi Belanja Baerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi. *Journal economics technology and entrepreneur*, 1(01 maret), 173-187.

Susanto, 2017. Analisis Efisiensi dan Efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN I**BIODATA PENELITI**

Nama : Ecty Windawirana Mentodo'
Tempat, Tanggal Lahir : Mamasa, 26 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : JL. Penjernihan 3 blok c no.2
No. telepon : 082290392059
Alamat Email : ectywindawirana@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Peneliti**

1. SDN 005 Rantebuda
2. SMP Negeri 1 Mamasa
3. SMK Negeri 1 Mamasa

Pengalaman

Organisasi : Unifa Choir periode 21 (Bendahara Umum)

Makassar, 9 September 2023

Ecty Windawirana Mentodo'

LAMPIRAN II

1. Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	950.798.541.214,82	936.597.348.120,24	98,51	1.007.726.906.417,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	32.374.434.935,40	31.144.643.233,24	96,20	31.929.447.578,44
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.695.395.924,08	5.085.800.477,65	108,31	5.297.397.859,71
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.109.238.752,09	6.235.267.556,00	87,71	5.765.818.463,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.882.594.591,53	2.898.322.127,00	100,55	3.179.172.515,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	17.687.205.667,70	16.925.253.072,59	95,69	17.687.059.140,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	867.008.688.476,42	863.091.651.164,00	99,55	933.403.875.703,39
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	687.906.407.000,00	683.870.270.511,00	99,41	753.464.862.411,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.975.847.000,00	5.893.053.453,00	98,61	6.162.280.193,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.437.304.000,00	819.325.579,00	57,00	597.768.600,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	495.966.812.000,00	494.356.232.000,00	99,68	538.535.197.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	184.526.444.000,00	182.801.659.479,00	99,07	208.169.616.618,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	161.374.233.136,00	161.329.860.000,00	99,97	154.436.676.000,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	161.374.233.136,00	161.329.860.000,00	99,97	154.436.676.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	14.728.048.342,42	14.891.520.653,00	101,11	14.002.337.292,39
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	14.728.048.342,42	14.891.520.653,00	101,11	14.002.337.292,39
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	51.415.417.801,00	42.361.053.723,00	82,39	42.393.582.736,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	51.415.417.801,00	42.361.053.723,00	82,39	42.393.582.736,00
5	BELANJA	988.011.783.126,17	947.218.415.455,53	95,87	800.678.128.062,00
5.1	BELANJA OPERASI	827.205.142.544,10	801.381.908.707,53	96,88	636.583.750.458,00
5.1.1	Belanja Pegawai	349.841.170.184,35	341.212.986.879,00	97,53	357.847.078.376,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.098.493.359,75	230.618.718.232,53	98,51	235.841.172.082,00
5.1.5	Belanja Hibah	38.015.850.000,00	37.736.100.000,00	99,26	20.282.800.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	22.612.700.000,00
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	205.249.629.000,00	191.814.103.596,00	93,45	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.709.421.342,14	118.738.794.658,00	90,15	161.648.377.604,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.985.367.871,06	5.771.771.500,00	96,43	5.821.283.100,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

Printed By Simba

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.241.310.301,07	25.797.172.866,00	73,20	33.037.894.302,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.792.918.711,90	49.374.120.092,00	95,33	58.140.240.513,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.024.853.215,11	33.233.224.297,00	94,88	58.477.832.642,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.664.971.243,00	4.562.505.903,00	124,49	6.117.127.047,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	29.097.219.239,93	27.097.712.090,00	93,13	2.446.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	29.097.219.239,93	27.097.712.090,00	93,13	2.446.000.000,00
6	TRANSFER	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	198.840.867.150,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	198.840.867.150,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	198.515.421.150,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	325.446.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.851.858.911,35)	(11.259.284.335,29)	29,75	8.207.911.205,83
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.406.232.047,35	15.523.420.598,35	40,42	7.950.320.841,52
7.1.1	Penggunaan SILPA	15.658.232.047,35	15.523.420.598,35	99,14	7.950.320.841,52
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	22.748.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	554.373.136,00	544.373.136,00	98,20	500.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	510.000.000,00	500.000.000,00	98,04	500.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Potok Pinjaman Dalam Negeri	44.373.136,00	44.373.136,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	37.851.858.911,35	14.979.047.462,35	39,57	7.450.320.841,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	3.719.763.127,06	0,00	15.658.232.047,35

Mamasa, 1 Januari 2020

BUPATI

H. RAMLAN BADAWI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 2

Printed By Simba

2. Laporan Realisasi APBD Kab. Mamasa Tahun 2021-2022



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Audited)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
PENDAPATAN - LRA	5.1.1	905.123.825.237,00	862.291.293.860,30	95,27	899.875.331.832,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.1.1	31.688.367.590,00	19.305.880.889,30	60,92	16.643.729.465,36
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	11.660.155.980,00	5.940.656.902,00	50,95	4.297.034.538,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	6.130.328.649,01	6.843.117.692,00	111,63	5.269.398.711,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	3.330.179.316,00	3.330.179.316,00	100,00	2.805.366.948,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	10.567.703.644,99	3.191.826.970,30	30,20	4.271.939.267,36
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.1.2	858.435.457.707,00	828.539.932.875,00	96,52	835.926.966.928,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	791.879.856.399,00	670.513.667.981,00	84,53	666.415.289.928,00
Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	6.708.541.000,00	8.166.107.451,00	120,65	9.928.562.776,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	1.992.121.000,00	2.024.766.147,00	101,64	1.781.504.943,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.3	490.054.190.000,00	489.895.520.000,00	99,93	489.195.519.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.1.1.2.1.4	203.064.704.300,00	170.626.664.383,00	84,03	165.529.894.207,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.1.1.2.2	139.793.602.900,00	139.651.360.000,00	99,90	153.917.532.000,00
Dana Penyesuaian - LRA	5.1.1.2.2.1	139.793.602.900,00	139.651.360.000,00	99,90	153.917.532.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	5.1.1.2.3	16.762.296.407,00	18.375.514.894,00	109,62	15.594.154.002,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.3.1	15.728.048.342,00	17.341.263.894,00	110,26	15.594.154.002,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	5.1.1.2.3.2	1.034.251.065,00	1.034.251.000,00	100,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	5.1.1.3	15.000.000.000,00	14.445.480.195,00	96,30	47.404.825.439,00
Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	15.000.000.000,00	14.445.480.195,00	96,30	16.542.334.705,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	30.762.590.739,00
BELANJA	5.1.2	1.123.151.318.568,00	952.869.141.656,94	84,84	925.410.149.297,76
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	797.855.391.845,00	612.000.476.982,36	76,46	605.452.899.449,00
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	366.861.532.091,00	340.103.491.937,00	92,71	343.021.380.054,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	268.868.879.363,00	215.685.663.136,36	80,22	212.210.411.935,00
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	3.680.128.091,00	3.491.444.869,00	94,87	227.059.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	51.288.984.700,00	36.554.173.540,00	71,27	48.557.657.860,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	17.155.867.600,00	16.165.702.600,00	94,23	1.435.700.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	209.757.327.723,00	135.421.306.374,58	64,56	96.750.682.097,94
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	7.574.098.600,00	5.247.564.000,00	69,28	6.775.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	25.694.569.175,00	13.935.561.136,00	54,24	17.850.059.445,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	45.982.035.232,00	35.012.388.195,00	76,14	13.422.080.476,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	124.935.949.814,00	77.092.850.558,58	61,71	25.321.000.493,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.570.674.922,00	4.132.942.484,00	74,19	33.373.541.683,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	100,00	22.599.059.550,22
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00	100,00	22.599.059.550,22

BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	189.638.599.000,00	189.547.359.200,00	99,95	200.607.598.200,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		189.638.599.000,00	189.547.359.200,00	99,95	200.607.598.200,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		189.638.599.000,00	189.547.359.200,00	99,95	200.607.598.200,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(218.027.493.271,00)	(96.577.847.796,64)	41,54	(25.434.817.465,48)
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	219.527.493.271,00	91.801.446.291,63	41,82	28.182.347.784,96
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	1.247.530.319,00	1.248.938.818,66	100,11	3.732.347.784,96
Pinjaman Dalam Negeri	5.1.3.1.2	218.279.962.952,00	90.552.506.472,97	41,48	24.450.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33	1.500.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	1.500.000.000,00	500.000.000,00	33,33	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO		218.027.493.271,00	91.301.446.291,63	41,88	26.682.347.784,96
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4	0,00	723.598.494,39	0,00	1.247.530.318,64

BUPATI MAMASA

H. RAMLAN BADARI